



ANALYZING STATE RELATIONS AND CAPITAL IN THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS OF SUMENEP 2020

MEMBACA RELASI DAN KAPITAL NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK SUMENEP 2020

M. Robet Rifqi Habibi¹, Umar Basalim²

^{1,2} Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

E-mail: robethabibi484@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Correspondent

M. Robet Rifqi Habibi
robethabibi484@gmail.com

Key words:

*reading relationships,
state capital,
simultaneous regional
elections,
Sumenep*

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 464 - 479

ABSTRACT

The Simultaneous Regional Elections of Sumenep 2020 were a significant political event at the local level, demonstrating the complexity of state relations and capital in the context of selecting local leaders. This research aims to uncover and analyze how the dynamics of local politics illustrate the relationships between political actors, the government, and elements of state capital during the Simultaneous Regional Elections of Sumenep 2020. Qualitative research methods were used to collect data through interviews, field observations, and document analysis. The research results show that the Simultaneous Regional Elections of Sumenep 2020 became a battleground filled with competition and conflicts of interest. The relationships between candidates, political parties, security forces, and local government played a central role in these dynamics. Furthermore, state capital, such as access to public resources and control over key institutions, influenced the political dynamics in this context. This study provides in-depth insights into how the 2020 local elections in Sumenep affected the political structure and state capital at the local level, as well as its implications for political governance and regional development.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden</p> <p>M. Robet Rifqi Habibi <i>robethabibi484@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: <i>membaca relasi, kapital negara, pilkada serentak Sumenep</i></p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 464 - 479</p>	<p>Pilkada Serentak Sumenep 2020 merupakan peristiwa politik penting di tingkat lokal yang memperlihatkan kompleksitas relasi dan kapital negara dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis bagaimana dinamika politik lokal menggambarkan hubungan antara aktor politik, pemerintah, dan elemen-elemen kapital negara selama Pilkada Serentak Sumenep 2020. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak Sumenep 2020 menjadi ajang pertarungan politik yang sarat dengan kompetisi dan konflik kepentingan. Relasi antara kandidat, partai politik, aparat keamanan, dan pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam dinamika ini. Selain itu, kapital negara, seperti akses terhadap sumber daya publik dan kontrol terhadap institusi-institusi kunci, memengaruhi dinamika politik dalam konteks ini. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan kepala daerah di Sumenep pada tahun 2020 memengaruhi struktur politik dan kapital negara di tingkat lokal, serta implikasinya terhadap tata kelola politik dan pembangunan daerah.</p> <p style="text-align: right;">Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hari ini merupakan sebuah kontestasi yang cukup penting di setiap daerah, bahkan dapat dikatakan telah menjadi sebuah agenda yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Lengsernya Presiden Soeharto tepatnya reformasi tahun 1998 merupakan sebuah momentum dalam merubah tatanan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan Negara. Reformasi tersebut memberikan dampak terhadap mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang awalnya menggunakan sistem perwakilan berubah menjadi sistem langsung, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Marijan, 2012).

Pilkada yang telah mengalami perubahan mekanisme telah memberikan ruang kesempatan yang luas kepada seluruh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam momentum politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya adanya antusiasme masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai kandidat di Pilkada, namun juga dalam bentuk pemberian hak suara dalam momentum politik.

Jika melihat mekanisme serta proses pemilihan dalam Pilkada pasca reformasi dalam artian Pilkada secara langsung, dapat kita gambarkan kontestasi tersebut seperti mobil. Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati memungkinkan untuk menang dalam Pilkada secara langsung jika mempunyai tiga kombinasi dalam berkendara, yaitu dengan memiliki mobil yang baik, sopir yang handal, serta bensin yang memadai. Secara konseptual pengibaratan tersebut tergambar dari tiga modal utama yang harus dimiliki oleh para pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilkada secara langsung. Ketiga modal tersebut yaitu modal politik, modal finansial (ekonomi), serta modal sosial. Pasangan calon dalam memperoleh dukungan dapat dipengaruhi oleh ketiga modal tersebut. Semakin besar akumulasi yang dimiliki oleh pasangan calon maka semakin besar pula peluang kemenangan yang akan didapatkan (Marijan, 2006).

Dalam sebuah kontestasi hal tersebut menjadi sangat penting, dengan mengandalkan popularitas dan figure seseorang dapat bersaing dalam Pilkada (Sahdan & Haboddin, 2009). Menurut Sahdan dan Haboddin yang patut diperhatikan oleh partai politik adalah calon yang diusung oleh koalisi partai politik, di mana dalam melakukan rekrutmen calon, hendaknya partai politik mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya; popularitas calon, kualitas calon, kapabilitas calon, kompetensi calon, termasuk juga di dalamnya adalah moralitas calon yang akan diusung oleh koalisi partai politik (Sahdan & Haboddin, 2009).

Mengamati dari beberapa hal tersebut, maka Pilkada secara langsung menempatkan sosok sebagai pertimbangan prioritas utama dalam menjatuhkan pilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh masyarakat. Dalam artian, bahwa modalitas pun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, lantaran saling berkaitan satu dengan yang lain.

Seperti halnya dengan daerah yang lain di Indonesia, Kabupaten Sumenep juga telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada oleh pemerintah daerah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep dalam momentum Pilkada serentak tahun 2020 menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Achmad Fauzi, S.H., M.H. berpasangan dengan Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I, dan Dr. Fattah Jasin, M.Si. berpasangan dengan Ali Fikri, S.Ag., M.Pd.

Pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah didukung oleh koalisi partai politik antara lain; Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Gerindra 6 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 kursi. Sedangkan pasangan Fattah Jasin dan Ali Fikri didukung oleh koalisi partai politik diantaranya; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 7 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, Partai Hanura 3 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai Golkar, dan Partai Gelora.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep setelah melakukan rapat pleno terbuka, akhirnya menetapkan Pasangan calon (paslon) Achmad Fauzi- Dewi Khalifah sebagai bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada serentak 2020 dengan perolehan suara 319.876 suara. Sedangkan pesaingnya paslon Fattah Jasin - Ali Fikri meraup 296.676 suara.

Menariknya kemenangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah dalam Pilkada serentak Kabupaten Sumenep membuat kemenangan dari partai politik pengusung pasangan calon ini, yaitu PDIP-P yang notabenehnya adalah partai politik beraliran nasionalis. Secara figure Achmad Fauzi memang sebagai incumbent dia adalah mantan wakil bupati sebelumnya, dan merupakan ketua partai politik PDI-P. Menariknya, jika dihitung dari kursi legislative koalisi partai politik pengusung paslon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah berjumlah total 20 kursi, masih lebih banyak kursi legislative partai politik yang mendukung paslon Fattah Jasin dan Ali Fikri sebanyak 30 kursi.

Sejarah pilkada atau bupati dan wakil bupati terpilih di Kabupaten tidak pernah dimenangkan oleh partai politik nasionalis. Biasanya bupati dan wakil bupati terpilih diusung antara PKB atau PPP, partai politik lainnya hanya sebatas menjadi pendukung dari kedua partai tersebut setiap momentum pilkada. Bukan tanpa alasan, karena baik PKB maupun PPP memiliki basis pendukung terbesar di Kabupaten Sumenep yang mana di dominasi oleh warga Nahdlatul 'Ulama (NU), dan NU merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di Kabupaten Sumenep.

Tidak hanya dari segi dukungan partai politik, secara modal ekonomi atau finansial pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan modal ekonomi yang dimiliki oleh lawan politiknya. Modal ekonomi dalam momentum politik termasuk Pilkada menjadi salah satu modal utama dalam menjalankan mesin politik, modal ekonomi yang dimiliki pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah hanya sebesar Rp. 150.000.000.

Secara tipologi masyarakat di Kabupaten Sumenep juga kurang menguntungkan bagi pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah. Masyarakat sumenep memiliki fanatisme terhadap symbol agama yang sangat kuat, termasuk dalam hal politik. Terlihat dari bagaimana masyarakat Kabupaten Sumenep menjadikan sosok kyai sebagai patron dan pemberi solusi dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta dianggap memperoleh berkah ketika mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh kyai. Karena, kyai di Kabupaten Sumenep adalah sosok konsultan baik dalam masalah sosial, budaya, agama, bahkan dalam masalah politik.

Jika dilihat dari segi modal yang dimiliki oleh pasangan calon Achmad Fauzi- Dewi Khalifah baik dari modal sosial, ekonomi, maupun politik bila dibandingkan dengan pasangan lawan politiknya maka asumsi awal pasangan Achmad Fauzi- Dewi Khalifah dapat dipastikan akan mengalami kekalahan dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep. Namun, hasil rekapitulasi yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU berkata lainnya, bahwa yang terpilih sebagai Bupati Sumenep adalah Achmad Fauzi.

Mengamati keberhasilan pasangan calon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah dalam memenangkan pilkada serentak tahun 2020 dengan perolehan suara yang cukup signifikan dengan tidak didukung oleh dua partai politik besar yaitu PKB dan PPP menarik untuk dielaborasi. Bagaimana relasi modal dan kekuasaan dalam memenangkan pilkada serentak pada tahun 2020.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perspektif Relasi dan Kapital Negara dalam Pilkada Serentak Sumenep

2020 Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), kajian Pustaka, dokumentasi serta Observasi sehingga menghasilkan data dan bahan untuk penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Modal dan Kekuasaan Politik Pilkada

1. Pasangan Achmad Fauzi - Dewi Khalifah

Achmad Fauzi sebelum mencalonkan diri sebagai bupati merupakan wakil bupati mendampingi K.H. Busyro Karim pada periode 2016-2021. Achmad Fauzi merupakan alumni baik jenjang S-1 maupun S-2 Program Studi Hukum di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Bupati terpilih ini kelahiran 12 Mei 1979 berusia 43 tahun, namanya memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Sumenep dengan kiprahnya sebagai wakil bupati di periode sebelumnya. Pasca terpilihnya Achmad Fauzi sebagai Bupati Sumenep dia ditunjuk menjadi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumenep.

Sedangkan wakil bupati terpilih Dewi Khalifah pernah aktif menjadi kader PKB dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumenep F-PKB pada periode 2004-2009. Dewi Khalifah sejak tahun 1986 sampai sekarang masih menjadi pengasuh Pesantren Aqidah Usymuni Tarete di Kabupaten Sumenep. Pendidikan tinggi dia tempuh jenjang S-1 di Universitas Putra Bangsa lulus pada tahun 2004, sedangkan untuk S-2 nya di Universitas NAROTAMA lulus pada tahun 2009.

Modal politik pasangan calon Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah tidak sebesar yang dimiliki oleh pasangan lawan, jika dilihat dari sisi Parpol pengusung. Achmad Fauzi diusung oleh Partai Politik (Parpol) yang pada hakekatnya bukan parpol yang mendominasi di kursi DPRD, bisa dilihat dari total jumlah kursi Parpol pengusung sebesar 20 dari 50 kursi di Kabupaten Sumenep, apalagi Achmad Fauzi berasal dari Parpol yang memiliki basis ideologi beraliran Nasionalisme yang tidak begitu mendominasi di Kabupaten Sumenep secara politik. Sehingga apabila direpresentasikan pada jumlah pemilih di Kabupaten Sumenep maka itu tidak menjamin akan mendapatkan kemenangan.

Achmad Fauzi diuntungkan dengan posisinya sebagai incumbent, mendampingi K.H. Busyro Karim pada periode sebelumnya. Sehingga Achmad Fauzi memiliki tiga jenis modal politik; Pertama, modal personal karena dia telah dikenal oleh masyarakat Sumenep selama dia menjabat sebagai Wakil Bupati. Kedua, modal professional, dimana dia sangat cermat dalam melihat segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menampung segala aspirasi dan melihat secara langsung ke lapangan. Ketiga, modal fungsional, Achmad Fauzi oleh PDI Perjuangan diberikan kesempatan menduduki posisi strategis sebagai calon wakil bupati untuk mendampingi K.H. Busyro Karim pada periode sebelumnya. Sedangkan Dewi Khalifah sebagai pasangan yang mendampingi Achmad Fauzi tidak memiliki background Parpol walaupun dulunya sempat menjadi kader PKB.

Achmad Fauzi sangat diuntungkan ketika dipasangkan dengan Dewi Khalifah yang memiliki modal sosial yang sangat baik, karena Achmad Fauzi tidak memiliki garis keturunan Kiyai bahkan tidak memiliki background santri sama sekali. Dewi Khalifah memiliki bekal sosial yang sangat menguntungkan, dia merupakan pengurus di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumenep semenjak tahun 1986 sampai sekarang. Tidak hanya menjadi pengasuh di pondok pesantren, namun Dewi Khalifah juga memiliki segudang pengalaman di Organisasi Masyarakat (Ormas) terbesar di Indonesia khususnya yang memiliki pengikut mayoritas dan fanatik khususnya di Kabupaten Sumenep yaitu Nahdlatul Ulama' (NU).

Misalnya; Dewi Khalifah pernah menjadi Ketua Fatayat NU Sumenep (1990-1999), Ketua Muslimat NU Sumenep (1999-2004/2004-2010), Ketua Muslimat NU Korda Madura, Pengurus PW Muslimat NU Jawa Timur (2010-2015), Ketua DPD IWAPI Sumenep (2013-2018), Ketua Bidang Ekonomi MUI Sumenep (2014-2019), dan kembali dipercayakan sebagai Ketua Muslimat NU ketiga kalinya (2015-2020). Walaupun hari ini dia tidak terafiliasi dengan Parpol manapun, dengan segudang pengalaman tersebut menandakan bahwa Dewi Khalifah tidak asing lagi di telinga masyarakat Sumenep yang mayoritas pengikut NU.

Pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dari segi modal ekonomi yang dimilikinya sebagai dana kampanye tidak sebesar dengan dana yang dimiliki oleh pasangan lawannya yakni Fattah Jasin-Ali Fikri Harits, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Sumenep tentang Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah yang bersumber dari pribadi pasangan calon dalam bentuk uang sebesar Rp. 150.000.000 (KPU, 2020b), namun hasil wawancara peneliti dengan bapak Bupati Fauzi beliau mengatakan bahwa selama proses Pilkada kemaren menghabiskan dana kampanye kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000.

Dana kampanye sebesar itu rasanya memang tidak besar bagi Achmad Fauzi karena jika dilihat dari pengalaman kerjanya meliputi sebagai berikut; Wartawan Tabloid Indonesia (2002-2004), Redaktur Pelaksana Majalah Indonesia (2004-2006), Pimpinan Redaksi Majalah Indonesia (2006-2008), Pimpinan Umum Majalah Indonesia Group (2008 - sekarang), Direktur Promosi PT. Karin Disney Jaya (2008 - sekarang), Direktur Umum PT. Petrogas Pantai Madura (2011-2013), Direktur Utama PT. Mahasa Madura Investama (2011 - sekarang), dan Direktur Utama PT. Djakarta Dua Satu (2013 - sekarang).

Sedangkan untuk Dewi Khalifah pengalaman kerjanya hanya sebagai pengurus di salah satu Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep (1986 - sekarang), dan pernah menjabat sebagai DPRD Kabupaten Sumenep (2004-2009). Bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah memiliki modalitas dominan yang berbeda, jika Achmad Fauzi lebih dominan kepada modal ekonomi dan modal politik, sedangkan Dewi Khalifah lebih dominan kepada modal sosialnya sedangkan untuk modal ekonomi dan politik tidak dominan.

2. Pasangan Fattah Jasin - Ali Fikri Harits

Fattah Jasin seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah ditunjuk sebagai Kepala Badan Koordinator Wilayah dan Pembangunan Pamekasan selama 9

tahun tepatnya Desember 2019 sampai September 2020. Fattah menempuh pendidikan tingginya jenjang S-1 di Universitas Jember (UNEJ), melanjutkan Magister di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan pada tahun 2004 menyelesaikan Doktoratnya di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Sebagai PNS Fattah Jasin tidak begitu dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sumenep karena sejak tahun 2006 aktivitasnya di Provinsi, serta pernah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab (PJ) Bupati Pamekasan pada tahun 2018. Sehingga secara elektabilitas Fattah Jasin tatkala mencalonkan diri sebagai Bupati Sumenep cukup rendah jika dibandingkan dengan Achmad Fauzi.

Sedangkan Ali Fikri Warits yang mendampingi sebagai calon Wakil Bupati Sumenep dikenal sebagai Kiai Muda yang dianggap orang baru dalam dunia politik lokal di kabupaten Sumenep. meskipun dianggap orang baru, namun darah politik Ali Fikri mengalir dari sang mendiang ayahnya yaitu K.H. A. Warits Ilyas yang berhasil mengangkat kursi PPP di DPRD Kabupaten Sumenep menjadi 7 kursi pada Pileg 2004. Sejak saat itulah Ali Fikri mengikuti jejak sang ayahandanya aktif di dunia politik dan menjadi kader PPP.

Secara politik pasangan calon Fattah Jasin memiliki modal yang besar jika dibandingkan dengan lawannya, karena diusung oleh dua Parpol yang memiliki partisipasi terbesar di Kabupaten Sumenep yaitu PKB dan PPP. Dukungan kedua Parpol tersebut menjadi modal utama bagi pasangan Fattah Jasin dan Ali Fikri Warits, sehingga Parpol yang cukup besar juga ikut mendukungnya dengan total 30 dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Sumenep. Namun secara personal Fattah Jasin tidak begitu mengenal tipologi politik masyarakat Sumenep karena aktivitasnya lebih banyak di Provinsi selama ini, walaupun telah didukung oleh dua Parpol besar yang memiliki basis ideologi agamis.

Modal ekonomi yang dimiliki pasangan Fattah Jasin – Ali Fikri Warits lebih besar jika dibandingkan dengan pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah, berdasarkan data dari KPU Kabupaten Sumenep tentang Laporan Penerimaan Sumber Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon Fattah Jasin – Ali Fikri Warits yang bersumber dari pribadi pasangan calon dalam bentuk barang sebesar Rp. 735.000.000 sedangkan dalam bentuk jasa sebesar Rp. 234.950.000, sehingga jika ditotal berjumlah Rp. 969.950.000 (KPU, 2020b). Jika dilihat dari sumber data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumenep maka dana tersebut 6 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang dimiliki oleh pasangan calon Achmad Fauzi – Dewi Khalifah.

Dana kampanye sebesar itu mayoritas keluar dari kantong pribadinya Fattah Jasin sebagai Calon Bupati, melihat dari pengalaman kerja dia misalnya; Kepala biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jawa Timur (2006-2010), Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Pemprov Jawa Timur (2010-2011), Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Timur (2011-2014), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur (2014-2016), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Timur (2016-2018), PJ Bupati Pamekasan (2018), Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur (2018-2019), dan Kepala Badan Koordinasi Wilayah dan Pembangunan Pamekasan (2019- 2020).

Sedangkan Ali Fikri secara modal ekonomi tidak terlalu besar karena selama ini fokus dalam pembangunan Ponpes Annuqayah Guluk-Guluk. Sehingga dapat

ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ali Fikri ini lebih dominan modal politik dan sosialnya dibandingkan dengan modal ekonominya, sedangkan Fattah Jasin lebih dominan modal ekonomi dibandingkan dengan modal politik dan sosialnya.

Jika dibuatkan table perbandingan modalitas yang dimiliki kedua pasangan calon sebagai berikut:

Modalitas	Achmad Fauzi-Dewi Khalifah	Fattah Jasin-Ali Fikri
Modal Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Achmad Fauzi pernah menjabat di dua perusahaanyaitu PT. Petrogas Pantai Maduradan PT. Mahasa Madura Investama • Relasi dari berbagai komunitas, baik basis agama, seni & budaya,maupun sosial ekonomi • Dewi Khalifah sebagai pengasuh pondok pesantren, organisatorisNU,Ketua IWAPI Sumenep 	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan PNS yang ada di Kabupaten Sumenep • Ali Fikri sebagai pengasuh Ponpes An-Nuqayah, memiliki garis keturunan K.H. A. Warits Ilyas
Modal Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai data KPU Rp. 150.000.000, menurut pemaparan Achmad Fauzilangsung sebesarRp. 1.000.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk barang Rp.735.000.000 • Bentuk Jasa Rp.234.950.000 Total Rp.969.950.000
Modal Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Achmad Fauzi sebagai <i>incumbent</i> yaitu WakilBupati di periode sebelumnya. • Menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Kab.Sumenep • Partai Pengusung: PDI- P,PAN, Gerindra, PKS, PBB.Dengan jumlah total kursi DPRD 20 dari 50 kursi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Pengusung: PKB, PPP, PD, Nasdem, Hanura • Partai Pendukung: Golkar, Gelora Dengan jumlah total kursi DPRD 30 dari 50 kursi

Terjadi Pergeseran Persepsi

Masyarakat Sumenep sangat kental akan etos maupun nilai religiusitasnya, nilai-nilai tersebut mampu ditaati serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam sector apapun. Ada sebuah ungkapan kuno yang dapat menggambarkan karakter masyarakat Sumenep; “abhântal syahadat asapok iman” (berbantalan syahadat berselimut iman). Ungkapan kuno ini menggambarkan bahwa masyarakat Sumenep dituntut untuk menjaga tatakrama, tingkah laku, serta berbudi luhur sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Ungkapan kuno tersebut telah menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat Sumenep, tidak hanya dalam hal hubungan antar masyarakat atau relasi sosial maupun etika dalam kehidupan. Terlihat bagaimana masyarakat Sumenep menjadikan para kiai sebagai patron atau panutan, bahkan jika masyarakat mengalami sebuah masalah atau problematika maka dapat dipastikan akan mencari solusinya dengan bertanya atau meminta pendapat dari para kiai. Ini menandakan

bagaimana masyarakat Sumenep sangat patuh dan tunduk serta menjadikan simbol-simbol agama sebagai pegangan dalam hidup mereka.

Tidak hanya dalam hal relasi sosial atau etika dalam kehidupan, etos maupun nilai religiusitas tetap dipegang teguh dalam hal politik praktis sekalipun. Misalnya, dalam memilih partai politik, masyarakat madura akan lebih memilih partai politik yang memiliki asas Islam daripada yang berbasis nasionalis apa lagi yang berbeda agama. Begitu juga dengan figure yang akan didukung baik kepala daerah, Presiden, maupun DPR, masyarakat madura dapat dipastikan akan memilih figure atau calon yang memiliki background santri, trah para kiai, atau setidaknya memiliki identitas keagamaan yang sangat jelas, tentunya yang dimaksud disini adalah Islam.

Sejarah membuktikan, pasca pemerintahan Kabupaten Sumenep dipimpin oleh keraton sejak Pilkada secara langsung diterapkan pertama kalinya, Kabupaten Sumenep selalu dipimpin oleh Bupati yang berasal dari partai politik yang memiliki basis Islam, periode 2000-2005 dan 2005-2010 berasal dari PPP, periode 2010-2015 dan 2015-2020 berasal dari PKB. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten Sumenep selalu didominasi antara PPP dan PKB, ini membuktikan bahwa partai politik berbasis nasionalis tidak laku di Kabupaten Sumenep.

Namun, dengan seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya pemberitaan kader-kader partai yang terjerat kasus korupsi, citra partai politik di mata masyarakat Sumenep secara perlahan mengalami sebuah pergeseran. Masyarakat Sumenep menganggap bahwa partai politik baik yang memiliki asas Islam maupun Nasionalis pada akhirnya sama saja, para kadernya sama-sama terjerat kasus korupsi. Sehingga, masyarakat Sumenep tidak lagi melihat bahkan tidak meyakini background partainya lagi namun lebih kepada sosok atau figure yang akan dicalonkan oleh partai politik.

Pergeseran persepsi terhadap citra partai politik di masyarakat Sumenep sangat disadari oleh Achmad Fauzi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Achmad Fauzi, di mana dia tetap menjaga citra partai politiknya selama menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep. Menjaga citra tersebut dengan memberikan rasa keadilan yang sama kepada masyarakat Sumenep, karena bagi Achmad Fauzi citra seorang pemimpin akan buruk jika tidak mampu memberikan rasa adil yang sama terhadap masyarakatnya.

Pengaruh Relasi Modal & Kekuasaan Achmad Fauzi-DewiKhalifah

Pada tahun 2020, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu daerah yang sedang menjadi perhatian publik selama Pilkada serentak. Tidak kalah menarik dengan Pilkada Kota Surabaya, maka menjadi wajar jika dikatakan bahwa Pilkada Kabupaten Sumenep dan Pilkada Kota Surabaya adalah dua Pilkada yang paling menarik di Jawa Timur pada tahun 2020. Terdapat dua pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di Kabupaten Sumenep antara lain; Achmad Fauzi - Dewi Khalifah melawan Fattah Jasin - Ali Fikri Warits. Pada akhirnya Pilkada Sumenep dimenangkan oleh pasangan Achmad Fauzi - Dewi Khalifah dengan total perolehan suara sebesar 319.876 suara.

Kemenangan Achmad Fauzi - Dewi Khalifah dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sumenep dikarenakan pasangan ini mampu untuk mengoptimalkan relasi modal yang dia miliki; baik modal sosial, ekonomi, maupun politik, serta relasi

kekuasaan yang dia sudah bangun sejak jauh-jauh hari. Tidak hanya mampu mengoptimalkan relasi modal dan kekuasaan, namun kemenangan ini tidak dapat terwujud tanpa ada dorongan dari tim sukses atau tim pemenangan mereka sebagai mesin politik yang berjalan secara masif dan efektif selama konstelasi Pilkada Sumenep berlangsung.

Terbukti dengan relasi modal dan relasi kekuasaan yang dimiliki serta memiliki tim sukses/pemenangan sebagai mesin politik yang berjalan dengan sangat baik mampu mengalahkan lawannya, yang pada hakekatnya secara modal politik dari sektor kelembagaan Parpol baik pengusung maupun pendukung lebih kuat dan mendominasi jika dibandingkan dengan Parpol yang mengusung pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah. Namun, dengan kelihaiannya tim pemenangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah dalam memainkan perannya dan kemampuan untuk mengkonversi modal sosial dan modal politik menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar dapat membawa kemenangan bagi pasangan Achmad Fauzi – Dewi Khalifah dalam konstelasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep.

a. Konversi Modal Sosial Menjadi Kekuatan Politik

Seperti apa yang menjadi pemikiran Pierre Bourdieu tentang modal sosial dapat dilihat dari relasi yang sudah dibangun oleh aktor politik baik secara kelompok maupun secara individu, sehingga terjalin sebuah jaringan sosial dengan kelompok maupun individu lainnya (Tokan, 2019). Sehingga seorang aktor politik dapat mengoptimalkan jaringan atau relasi yang sudah terbangun sebelumnya dapat dimanfaatkan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya, sehingga kemenangan yang didapatkan tidak semata-mata karena faktor lembaga atau organisasi politik yang menjadi kendaraannya.

Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah secara efektif mampu memainkan ketiga elemen yang terkandung dalam modal sosial yaitu; *Pertama*, Jaringan Sosial. Achmad Fauzi diuntungkan sebagai *incumbent* yaitu Wakil Bupati pada periodesebelumnya, keuntungan tersebut mampu dimanfaatkan oleh Achmad Fauzi untuk membangun relasi sosial kepada berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Sumenep. Membangun relasi ini dalam bentuk menghadiri setiap undangan agenda yang diadakan oleh berbagai komunitas baik agendanya besar maupun kecil. Dengan selalu hadirnya Achmad Fauzi, secara tidak langsung Achmad Fauzi telah merangkai berbagai komunitas menjadi sebuah jaringan sosial.

Jaringan yang telah terbangun menjadikan Achmad Fauzi memiliki popularitas yang cukup tinggi tidak hanya dikenal, bahkan disukai dan diyakini oleh masyarakat Kabupaten Sumenep, ketiga hal ini oleh Achmad Fauzi disebut dengan istilah “3D”. Bagi Achmad Fauzi tanpa adanya “3D” masyarakat tidak dapat meyakini bahwa figure tersebut mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Sumenep kedepannya. Popularitas yang dimiliki oleh pasangan calon juga menjadi salah satu hal yang penting agar dapat meyakinkan masyarakat (Lestari, 2021).

Kedua, kepercayaan. Achmad Fauzi selalu menghadiri setiap undangan yang datang, misalnya diundang dalam agenda istighatsahan, konser, dan lain sebagainya. Bahkan jika diundang dalam konser music baik dangdut, rock,

maupun jazz, maka akan mempelajari dan menghapuskan lagunya terlebih dahulu jika Achmad Fauzi tidak mengetahui aliran music tersebut. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk sikap berlaku adil kepada semua kelompok masyarakat, dan berusaha sebisa mungkin kehadirannya betul-betul dirasakan. Sikap adil tersebut, secara otomatis meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Achmad-Fauzi.

Salah satu masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa itu memang menjadi cara Achmad Fauzi dalam membangun rasa kepercayaan terhadap masyarakat. Bahkan dalam kampanyenya dia berjanji akan mudah untuk ditemui oleh masyarakat baik individu maupun kelompok:

“waktu jaman K.H Busyro ada mahasiswa yang ingin mewawancarai beliau untuk kepentingan tesis juga, tapi beliau tidak bisa ditemui. Kalau sekarang Fauzi mudah sekali untuk ditemui, dan itu masuk dalam janji kampanyenya. Buktinya dia bisa sampean temui untuk diwawancarai.”

Ketiga, norma. Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah sangat memahami norma atau nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumenep. Terdapat sebuah falsafah hidup yang selama ini diyakini dan termasuk dalam bagian dari silsilah keraton yaitu “Bhuppa’ Bhabbhu’ Ghuru & Rato”, falsafah ini atau yang bisa disebut dengan hierarki kepatuhan. Hierarki ini menggambarkan, bahwa masyarakat madura menganut patronisme dalam setiap mengambil keputusan.

Pemahaman akan norma tersebut, Achmad Fauzi melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, maupun para kiai, dimana mereka ini menjadi patron yang selalu menjadi tempat mencari solusi oleh masyarakat setiap menghadapi masalah. Patronisme kepada para kiai masih sangat kental dikalangan masyarakat, tidak hanya dalam persoalan sosial, ekonomi, bahkan dalam sector politik juga. Selain terjun langsung ke masyarakat, Achmad Fauzi selalu mendengar setiap aspirasi di suarakan oleh para kiai serta melihat ke lapangan secara langsung, dan segera memberikan solusinya secara cepat dan akurat.

b. Konversi Modal Sosial Menjadi Kekuatan Ekonomi

Kekuatan politik yang dibangun melalui kelembagaan partai politik memang menjadi penunjang dalam pemenangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan ekonomi juga menjadi faktor yang mendukung kemenangan pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep. Namun, yang menarik dalam konteks Pilkada Sumenep, pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah mampu mengkonversikan modal sosial yang sudah dibangun menjadi sebuah kekuatan ekonomi.

Dikenalnya Achmad Fauzi ditengah masyarakat jauh sebelum kontestasi Pilkada serentak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sumenep menjadi keuntungan tersendiri bagi pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah. Selama menjabat sebagai Wakil Bupati, Achmad Fauzi mampu memanfaatkan jabatannya untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan segala aspirasinya dan memberikan solusi, sehingga masyarakat menyukai kiprah Achmad Fauzi selama menjadi Wakil Bupati. Waktu yang panjang dalam

mensosialisasikan diri sejak menjabat sebagai Wakil Bupati sampai dalam kontestasi Pilkada serentak dapat meminimalisir kebutuhan finansial, karena semakin pendek waktu untuk sosialisasi diri maka pengeluaran finansial akan semakin besar (Maria *et al.*, 2019). Dalam kontestasi Pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar agar mesin politik berjalan dengan massif.

Kekuatan ekonomi dalam masa kampanye menjadi penggerak mesin politik, dana yang dibutuhkan dapat dikatakan sangat besar, baik dalam bentuk baleho, iklan, serta mencetak poster, dan tentunya kebutuhan tak terduga lainnya. Bahkan, dalam beberapa kontestasi modal ekonomi tidak hanya menjadi modal utama dalam kemenangan, namun menjadi prasyarat agar mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah yang dikeluarkan oleh partai politik, lantaran modal ekonomi merupakan modal yang dengan mudah dapat ditukarkan dengan modal yang lainnya (Permatasari, Bainus, & Akbar, 2022).

Tidak berbeda dengan kekuatan politik yang dibangun dengan strategi gotong royong, Achmad Fauzi yang memiliki modal ekonomi yang bisa dibilang cukup kecil, juga memanfaatkan strategi gotong royong dengan basis sosial yang sangat kuat. Strategi gotong royong dengan membagi 2 sampai 3 kepala daerah dan 7 DPRD setiap poskonya mampu mengumpulkan dana sebesar Rp.500.000.000, jika dikalikan dengan jumlah posko yang ada sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 27 kecamatan maka total sebesar Rp.13,500.000.000, dana yang berhasil dikumpulkan dengan strategi gotong royong. Terkumpulnya dana ini atas kesadaran pribadi kader masing-masing yang ditugaskan oleh partai di setiap poskonya. Hal ini sesuai dengan apa yang jelaskan oleh Achmad Fauzi:

“...Langsung ada poskonya datang saya kesana, Bupati A Bupati B kadang ada 3 Bupati disitu ngumpul, dikasih 2 kecamatan gocek pribadi keluar, begitu merebbut kekuasaan...”

Adanya strategi gotong royong ini membuat PDI Perjuangan dapat memenangkan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sumenep yang pada hakekatnya merupakan basis massa kultur atau agama yang sangat kuat, di sisi lain pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah sudah memiliki apa yang disebutnya dengan “3D” di atas; dikenal, disukai, diyakini. Walaupun partai politik yang mengusung Achmad Fauzi berwarna merah kerap kali dilempar isu sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), walaupun pada hakekatnya isu itu tidak benar, tidak memiliki dampak apa-apa terhadap masyarakat karena masyarakat sudah percaya terhadap partai dengan menggunakan konsep gotong royong tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan dari Analisa dan pembahasan pada BAB sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dapat memenangkan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumenep karena diuntungkan dengan adanya pergeseran persepsi di tengah masyarakat terkait citra partai politik. Pada awalnya masyarakat Sumenep kental akan fanatisme symbol

agama termasuk pilihan terhadap partai politik seiring berjalannya waktu mulai berubah dengan banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Sehingga muncul sebuah persepsi baru bahwa ternyata sama saja baik yang berasas Islam maupun nasionalis sama-sama berpeluang untuk melakukan korupsi.

Tidak hanya terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap citra partai politik dapat memenangkan pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah karena menggunakan strategi gotong-royong. Dengan strategi tersebut Achmad Fauzi mampu mengkonversikan modal politik dan modal sosial menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Strategi gotong royong dalam membangun kekuatan politik dan kekuatan ekonomi memiliki dua pola:

Pertama, kader PDI Perjuangan dari luar Sumenep mendapatkan perintah langsung dari pimpinan di atasnya untuk ikut membantu di Pilkada Kabupaten Sumenep. Para kader ini disebar ke setiap posko pemenangan yang sudah dibentuk yang tersebar di setiap kecamatan. Bahkan di setiap posko ditugaskan dua sampai tiga kepala daerah dan tujuh DPRD yang telah diberikan data yang rinci tentang kecamatan yang diampu.

Kedua, membagi para kadernya untuk mengampu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep, dan sudah dibekali dengan data tentang irisan pondok pesantren tersebut dengan pondok yang ada di Jawa Timur, dengan targetan mendapatkan rekomendasi dukungan terhadap pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dalam Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Sumenep secara tertulis.

Dengan menggunakan strategi gotong royong yang telah dibagi setiap posko pemenangan di setiap kecamatan. Para kader yang sudah ditugaskan, mereka dengan suka rela mengumpulkan uang pribadi untuk menjalankan mesin politik, dana yang terkumpul setiap poskonya sebesar Rp.500.000.000., jika dikalikan dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep maka total dana yang terkumpul sebesar Rp.13.500.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Riyanto, E. D. (2021). Relasi Kuasa Wacana Trauma Tubuh dalam Film *Ku Cumbu Tubuh Indahku*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4598– 4609.
- Akhyar Yusuf Lubis. (2016). *Posmodernisme.pdf*.
- Analisa, J., Jurnal, S., Sosiologi, A., Suparto, D., Sutjiatmi, S., & Habibulah, A. (n.d). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. In Januari (Vol. 2022, Issue 1).
- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169–185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Apptika, N., Sekolah, F., Ilmu, T., & Bandung, A. (2019). Kapital Politik dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Study Kasus Pemenangan Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani Dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015). In *Jurnal Caraka Prabu* (Vol. 3, Issue 1).

- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana Pada Pilkada di Lampung Timur Tahun 2015 Oleh: Hertanto □ &Handi Mulyaningsih •. (n.d.).
- Chairunisa, W., Putri, I. A., & Anggraini, D. (2019). Pemanfaatan Modal Sosial Deri Astadan Zohirin Sayuti pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2018. In *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* (Vol. 1). <https://sumbar.antaraneews.com/>.Diakses
- Cindy, O., Fure, I., Pati, A. B., & Posumah, D. (n.d.). Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Halmahera Barat.
- Ciptono, C., & Pujileksono, S. (2021). Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Pertukaran Sosial (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2019 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1562>
- Darma, Z. A. R. (2022). Buku Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. 119.
- Doe, H., Muhammad, M., Sukri, S., & Ariana, A. (2020). Pemanfaatan Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 296. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a6>
- George Ritzer. (2021). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Ilmu politik. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–11.
- Jhon Field. (2016). Modal Sosial.pdf.
- Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(1), 91–114. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4297>
- Kartika, I. (2019). Modal Kandidat Perempuan dalam Pilkada Tahun 2017 (Studi Kasus: Tjhai Chui Mie Sebagai Walikota Terpilih Di Kota Singkawang).
- KPU. (2020a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
- KPU. (2020b). Pengumuman-961-Hasil-LPSDK-Pilbup-Sumenep-2020.pdf. Lestari, W. (2021). Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
- Malasari, F., & Putra, E. V. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 295. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.254>
- Maria, Y., Nahas, G., Kolne, Y., Ip, S., Si, M., Usboko, I., ... Si, M. (2019). *Jurnal Poros Politik* ISSN : 2528 - 0953 Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif Periode 2019- *Jurnal Poros Politik* ISSN : 2528 - 0953, (1).
- Nugrahani, F. (2014). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305.

- Permatasari, I. R., Bainus, A., & Akbar, I. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam Dalam Pemenangan Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 29–42.
- Permatasari, I. R., Bainus, A., & Akbar, I. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Pasangan Idris-Imam dalam Pemenangan Pemilihan Walikota Depok Tahun 2020. *Jurnal MODERAT*, 8(February), 29–42.
- Praktik, S., Uang, P., Pilkada, P., & Tahun, S. (2021). 1), 2) 1). 5(2).
- Putri, D. G. (2021). Modal Sosial Pedagang Durian Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang. 5, 4650–4657.
- Rahmatullah, A. F. (2021). *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen*. 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12928>
- Resky, O., & Wanta, B. (n.d.). Modalitas dan Strategi Kandidat Pada Pilkada Mitra 2018.
- Retrieved from <http://www.slideshare.net/mcrosiqin/paradigma-sosiologi>
- Jenkins, R. (1992). Membaca Pikiran Pierre Bourdieu.
- Riswandi, R., Nurdin, R., & Alamsyah, A. (2019). Klan Politik: Studi tentang Rivalitas Caleg Keluarga Padjalangi Dan Halid Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 290–314. <https://doi.org/10.24252/profetik.v7i2a7>
- Ritzer, J. G. (2014). *Teori Sosiologi.pdf*.
- Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Terhadap, K. (2021a). Kritik terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–12.
- Siregar, M., Wijaya, U., Surabaya, K., & Terhadap, K. (2021b). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–12.
- Tilome, A. A., Agustang, A. D. M. P., & Agustang, A. (2021). Pertukaran Sosial Elit Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. *OSF Preprints*, January 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6tu79>
- Tokan, F. B. (2019). Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019. *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan*, 1(2), 181–198.
- Wardiono, G., Sugiarto, B., Rofik, A., Purwono, A., Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Samarinda Najeri Al Syahrin, A. M., Dziqie Aulia Al Farauqi, M., Wahyuni Jamal, S., Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar Hidayat Doe, P., di Indonesia, O., & Kapital Yang Dominan, R. (n.d.). *Internationalization Of Islam Rahmatan Lil 'Alamin Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation and Contribution*.

Zainal, N. A., & Khaldum, I. (2017). Local Strongmen dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni Dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah. *Sulesana*, 11(1), 47-63.

Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.